

TAMBLINGAN DALAM REKAMAN PRASASTI

Oleh

I Gusti Made Suarbhawa

I

Saat ini Tamblingan adalah nama sebuah danau dan sebuah dusun yang secara administratif masuk wilayah Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng. Di wilayah ini yaitu di pinggir hutan tepi timur Danau Tamblingan terdapat situs arkeologi. Situs ini diketahui berdasarkan temuan selembar prasasti tembaga oleh Pan Niki di areal kebun di pinggiran timur Danau Tamblingan pada tahun 1987. Dengan adanya temuan prasasti tersebut, kemudian Balai Arkeologi Denpasar melakukan penelitian di situs ini secara bertahap sejak tahun 1988. Hingga kini telah dilakukan tujuh tahap penelitian.

Dari serangkaian penelitian ekskavasi diperoleh berbagai macam temuan, antara lain lempengan besi, butiran logam, fragmen kawat perunggu, gelang perunggu, uang kepeng, tembikar, tembikar yang berisi lelehan logam, pecahan keramik, batu asahan, batu struktur, dan sisa-sisa organisme.

Di satu pihak serangkaian penelitian dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar, di lain pihak hadir beberapa artikel yang berupaya mengungkap tentang Tamblingan dari berbagai aspek. Artikel-artikel tersebut antara lain : "Mungkinkah Tamblingan Situs Perundagian", "Celak Kontong Lugeng Luwih", oleh Purusa Mahaviranatha, "Desa Tam-

blingan Sekitar Abad 10 - 14 Masehi" (Kajian Epigrafi) oleh I Wayan Suantika, "Ritus Memendak Taulan Salah Satu Aspek Budaya Kesatuan Wilayah Tamblingan Kuna" oleh I Made Geria, "Gacuk Salah Satu Sarana Permainan Masyarakat Tamblingan" oleh I Gusti Agung Ayu Mas Ratnawati", dan "Sisa-sisa Hewani Hasil Ekskavasi Situs Tamblingan" oleh Anak Agung Gde Bagus.

Dalam tulisan ini akan ditelaah beberapa aspek yang menonjol tentang Tamblingan berdasarkan data yang terekam dalam prasasti, yaitu lokasi *kāraman tamblingan*, pajak-pajak, iuran pungutan dan yang sejenis serta kelompok perajin besi. Prasasti digunakan sebagai sumber data didasarkan atas pertimbangan bahwa prasasti sebagai sumber sejarah kuna mempunyai kualitas yang sangat tinggi, karena dari isinya dapat diperoleh gambaran tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang sezaman dengan suatu prasasti (Boechari, 1977 : 22). Meskipun demikian harus diakui bahwa prasasti tidak luput dari kelemahan, antara lain penulis prasasti tidak bermaksud untuk mewariskan keterangan yang lengkap kepada generasi yang akan datang, termasuk kepada kita yang hidup pada masa kini. Penulis prasasti juga tidak memandang perlu untuk memberikan keterangan yang sejel-

jelasan, sebab bagi mereka yang hidup sezaman dengannya sudah mengetahui maksud yang terkandung dalam prasasti (Boechari, 1977: 13). Selain itu tidak jarang prasasti ditemukan dalam keadaan tidak utuh berupa bagian-bagian yang terpotong atau fragmen-fragmen.

Menyadari kelemahan-kelemahan prasasti tersebut, maka dimanfaatkan pula sumber-sumber kesusastraan atau naskah yang memuat keterangan yang berdekatan. Bertitik tolak dari kenyataan ini, maka dalam pemaparan ini akan terdapat kekurangan antara lain dalam interpretasi.

II

Tidak banyak prasasti yang memuat keterangan tentang Tamblingan, hingga kini diketahui ada enam buah. Berita tertua tentang Tamblingan dimuat dalam prasasti Gobleg, Pura Batur A. Prasasti yang berbahasa Bali Kuna ini tidak lengkap, hanya satu lempeng bagian awal. Berdasarkan nama-nama pejabat yang disebut di dalamnya, diduga prasasti ini berasal dari raja Ugrasena yang memerintah di Bali sekitar tahun 837-858 Saka (915-936 Masehi). Isi pokok prasasti ini menyebutkan beberapa orang pejabat wakil masyarakat golongan *Wisnawa* di Tamblingan yang mengemukakan keadaan tempat tinggalnya yang ada di sekitar bangunan suci *Hyang Tahinuti*. Berkait erat dengan permasalahan tempat tinggal juga diatur pengelolaan harta tinggalan orang-orang putus keturunan agar dipakai untuk membiayai perbaikan tempat-tempat suci.

Prasasti Gobleg, Pura Batur B. yang lempengannya tidak lengkap yaitu tanpa lempeng pertama, diduga dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu, memuat keterangan relatif memadai. Di dalam prasasti disebut penduduk desa Tamblingan menghadap kepada raja hendak membicarakan keberatannya untuk melaksanakan kerja bakti (*buncang haji*) membuat gubuk, pintu gerbang, *pūnca giri*, dan *wanteyan* di Manasa. Mereka memohon agar dibebaskan dari kewajiban itu, karena dirasakan sangat berat. Permohonan itu dikabulkan oleh raja dengan ditetapkannya anugrah kepada penduduk desa Tamblingan, sehingga mereka tidak lagi melakukan kerja bakti membuat gubuk, pintu gerbang, *pūnca giri*, *wanteyan*, dan pekerjaan-pekerjaan lain di Manasa. Ditetapkan pula berbagai macam tugas dan kewajiban yang mesti ditunaikan serta hal-hal yang dibebaskan. Selain itu ditetapkan juga masalah *sukhadukha* atau hal-hal yang berkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah desa Tamblingan, serta pula batas-batas wilayah desanya.

Prasasti Bulian B. yang berangka tahun 1103 Śaka atau 1181 Masehi yang dianugrahkan kepada *kāraman banū bwah* memuat keterangan sepintas tentang *pande besi* yang ada di Tamblingan. Disebutkan, para *pande besi* yang bermukim di *banū bwah* dalam melakukan aktivitasnya hendaknya mentaati pejabat *sangat taji*. Mereka tidak akan disalahkan oleh pejabat, demikian pula hasil produksinya tidak akan diambil oleh

pande besi yang bermukim di Tamblingan.

Keterangan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan prasasti Gobleg Pura Batur B. tercantum dalam prasasti Kerobokan yang lebih dikenal dengan nama prasasti Buyan Sanding Tamblingan. Prasasti ini berangka tahun 1103 Saka dikeluarkan oleh raja Jayapangus, dan tergolong ke dalam tipe prasasti asli atau *authentieke stukken* (Atmodjo, 1970 : 3-4). Prasasti ini dikeluarkan untuk mengantisipasi kegelisahan, ketakutan dan kesedihan hati penduduk *kāraman buyan sanding tamblingan* akibat sering berselisih paham dengan pejabat *sang admak akmitanāpi gajih* dalam urusan *padrwyahaji* (semacam pajak kerajaan). Untuk menindaklanjuti kasus ini, maka di dalam prasasti ditetapkan bermacam-macam pajak, iuran, pungutan, denda, dan hukuman yang dikenakan kepada penduduk apabila mereka melalaikan atau melanggar tugas-tugas tertentu. Seperti halnya dengan prasasti Gobleg, Pura Batur B., dalam prasasti ini juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan *sukhadukha*. Demikian pula ditentukan *parimandala cinaturdesa* atau batas keempat arah wilayah *kāraman buyan sanding tamblingan*.

Setelah empat buah prasasti tersebut di atas, dalam kurun waktu yang relatif lama sampai dengan akhir masa pemerintahan raja Bali Kuna yang terakhir yaitu raja Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten, tidak diterbitkan prasasti yang berkenaan dengan masyarakat Tamblingan. Baru pada tahun 1306 Śaka (1384 Masehi) terbit prasasti berkenaan dengan

masyarakat Tamblingan, yang ditemukan oleh Pan Niki pada tahun 1987, dan untuk selanjutnya disebut dengan prasasti Tamblingan. Prasasti ini terdiri atas selembur tembaga yang bertulis pada kedua belah sisinya, menggunakan Bahasa Jawa Kuna yang sudah mendekati langgam bahasa Jawa Tengahan, dan tidak menyebut nama raja yang mengeluarkan titah ini.

Isi pokok prasasti ini adalah mengenai perintah raja kepada *pande besi* di Tamblingan supaya kembali ke desanya untuk bekerja seperti semula. Mereka akan diatur oleh para pejabat yang berkedudukan di Ularan. Aryya Cengceng dilarang mengganggu ketentraman penduduk di Tamblingan supaya pergi dari Tamblingan bertempat tinggal di Lo Gajah. Penduduk desa Tamblingan dikenai *pangraga sékar* (sejenis iuran) sebanyak 200 setiap pintu yang dibayar setiap bulan *kawolu*. Mereka diharapkan juga agar lebih memperhatikan para sepeuh yang ada di Tamblingan, yaitu Hunusan, Pangi, Kdu, dan Tngah Mel.

Keterangan yang hampir sama dengan prasasti Tamblingan dimuat dalam prasasti Gobleg, Pura Batur C (Callenfels, 1926 : 13), yang dikeluarkan pada tahun 1320 Śaka (1398 Masehi) oleh seorang raja atau tokoh yang tidak menyebutkan nama atau jati dirinya. Tokoh itu mengeluarkan perintah untuk memperkokoh sabda telapak beliau Paduka Bhattara Sri Parameswara yang dicandikan (*sang mokta*) di Wiṣṇubhawana.

III

Memperhatikan keterangan prasasti Gobleg, Pura Batur A., diketahui bahwa pada awal abad ke-10 di daerah Tamblingan sudah ada suatu pemukiman yang sebagian dari penduduknya merupakan golongan atau kelompok pemuja Dewa Wisnu. Wisnu merupakan salah satu dari tiga dewa utama dalam pantheon Hindu yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa-dewa ini sering dipersonifikasikan dengan alam atau kekuatan alam, misalnya Wisnu diidentikkan dengan air atau sebagai penguasa air. Dalam konteks ini belum jelas atau tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa golongan pemuja Wisnu di Tamblingan bermukim di tepi danau.

Terlepas dari ketidakjelasan lokasi pemukiman pemuja Wisnu di Tamblingan, keterangan dalam prasasti Gobleg, Pura Batur A. menunjukkan, bahwa mereka hidup dalam suatu masyarakat yang cukup teratur dalam suatu tatanan sosial, terbukti dari sikap kepeduliannya terhadap masalah pemukiman, misalnya untuk perbaikan pertapaan, wihara, dan tempat-tempat suci di wilayah desanya dibiayai dengan dana yang bersumber dari harta warisan tinggalan orang-orang yang putus keturunan.

Berkait erat dengan lokasi pemukiman masyarakat Tamblingan, sangat menarik keterangan di dalam prasasti Gobleg, Pura Batur B. dan prasasti Buyan Sanding Tamblingan. Pada kedua prasasti ini disebut *kāraman* yang berbeda. Di dalam prasasti Gobleg, Pura Batu B. disebut *kāraman i tamblingan*, sedangkan

dalam prasasti Buyan Sanding Tamblingan disebut *kāraman buyan sanding tamblingan*. Tidak diketahui dengan jelas apakah kedua nama *kāraman* yang disebut dalam prasasti mengacu kepada dua *kāraman* yang berbeda ataukah satu *kāraman*. Dalam persoalan ini yang perlu diperhatikan adalah batas-batas keempat arah wilayahnya dan nama-nama tempat lainnya. Batas-batas wilayah *kāraman tamblingan* yang disebut dalam prasasti Gobleg, Pura Batur B. adalah batas sebelah timur perdahanan, batas sebelah utara tempat penyerahan kuda dengan kereta, lurus ke atas kemudian turun sampai di tajung, ulunher, sri gampuhan, wunut matungked, kalyaga, bingin jurang slat, kdu, kali, kunyit, sampai di hujung berbatasan dengan jalan raya, sampai di hara sungsang, di panawangan sampai di banyu sungkur, di tngahmel sampai di watu macpak. Dalam prasasti Gobleg, Pura Batur C. dan prasasti Tamblingan disebut nama-nama tempat seperti hunusan, pangi kdu, dan tngahmel. Untuk mengetahui nama-nama ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena diperlukan penyusuran lapangan yang intensif. Sekarang dikenal beberapa tempat yang sama dan mirip dengan nama-nama tempat yang disebut dalam prasasti yang lokasinya dekat maupun jauh dari Dusun Tamblingan. Hunusan sekarang masih ada di sebelah utara Desa Gobleg. Kdu sekarang menjadi nama sebuah dusun Kedu di dekat Asah Panji. Banyu Sungkur sekarang dikenal dengan nama Yeh Sengkuh yang terletak di sebelah barat Desa Banyuatis. Di wilayah Umajero terdapat suatu

tempat bernama Batu Macongkak yang mirip dengan watu macpak. Di hutan antara Danau Tamblingan dan Danau Buyan terdapat pura Tajun yang mirip dengan tajung. Ulunher mungkin identik dengan pura Hulun Danu yang lokasinya di tepi timur Danau Tamblingan.

Batas-batas wilayah *kāraman buyan sanding tamblingan* tidak diketahui dengan lengkap pada keempat arah, oleh karena lembaran prasasti yang memuat bagian ini terpotong. Batas sebelah utara adalah Batu Marejan yang masih tertinggal menjadi Batumejan di dekat Danau Buyan. Batas sebelah barat Batu mangadeg, sekarang tidak diketahui dengan jelas akan tetapi di sebelah timur laut Danau Buyan terdapat Dusun Batudinding. Talimanuk, mungkin batas sebelah selatan yang tidak diketahui dengan jelas lokasinya. Kurang lebih lima belas kilometer di sebelah barat Danau Tamblingan terdapat Desa Kedis, tetapi tidak jelas apakah Desa Kedis identik dengan Talimanuk (Atmojo, 1970 : 32). Talimanuk tampaknya lebih mendekati Desa Blahmanukan yang juga terletak di sebelah barat Danau Tamblingan, yaitu di sebelah selatan Desa Kekeeran dan di sebelah timur Desa Subuk. Sekitar tahun 1960-an nama desa ini diubah dengan nama Tinggarsari.

Terlepas dari masalah apakah *kāraman tamblingan* dan *kāraman buyan sanding tamblingan* mengacu kepada dua *kāraman* yang berbeda ataukah satu *kāraman*, dan memperhatikan nama-nama tempat serta batas-batas wilayahnya, maka tampaknya lokasi *kāraman* ini harus

dicari di daerah sekitar Danau Buyan dan Tamblingan. Di samping itu, sekarang tidak jauh dari Danau Tamblingan kurang lebih satu kilometer ke arah selatan, terdapat Dusun Tamblingan.

Sangat menarik keterangan prasasti Gobleg, Pura Batur B. dan prasasti Buyan Sanding Tamblingan, khususnya yang berkenaan dengan berbagai macam pajak, iuran, pungutan, cukai, denda dan hukuman yang dikenakan kepada penduduk apabila mereka melalaikan atau melanggar tugas-tugas tertentu, demikian pula dengan yang dibebaskan jumlahnya cukup banyak. Tugas, kewajiban, pajak, iuran, dan pungutan yang mesti dikenakan dan yang dibebaskan sangat disayangkan sebagian besar tidak diketahui artinya secara jelas.

Dari kedua prasasti tersebut diketahui mereka dibebaskan dari beberapa tugas, pajak, iuran, dan pungutan antara lain *pangiwo*, *pangleyö*, *palaris*, *papilih mas*, *patring*, *pawši*, *pabhum*, *panali karundung*, *pabusung*, *pahalalang*, *pasampat hayam swayēr*, *pajējētan*, *patuwuh*, *padangsil*, *pawwat*, *palalab*, *pahisēng*, *palinggung*, *papañjut*, *pabhukta*, *patapak*, *pasarang*, *papagēr larung batu*, *pawalungan*, *pahulēs*, *palekha*, *patumbuk*, *pawawar*, *pakamkap*, *paparurunduh*, *pakirab*, *patusuk*, *pacadar*, *pawija*, *palanting*, *byaya ampung*, *wadi ming wdus*, dan lain-lain. Di balik keringanan-keringanan itu mereka wajib membayar pajak kepada kerajaan (*drwyahaji*) pada tiap-tiap bulan *Magha* dan *Karttika*, *patikel tanah*, *haputuliwatu*, *parmasan*, dan beberapa jenis pungutan lain. Mereka juga

diwajibkan menjamu sebatas kemampuannya apabila ada petugas-petugas kerajaan datang ke desanya. Berdasarkan nama-nama pajak dan iuran tampaknya ada yang mengacu kepada pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya *pacadar* berhubungan dengan pembuatan pakaian, *pawalungan* berkaitan dengan peternakan.

Sangat menarik satu di antara beberapa macam pajak atau iuran yang dikenakan kepada *kāraman tamblingan* seperti yang tercantum dalam prasasti Gobleg, Pura Batur B. adalah *parmasan*. Untuk lebih jelasnya tentang pajak ini sebagai ilustrasi akan dikutip bagian prasasti yang memuatnya sebagai berikut.

"... , mangkana yan hana wwang i tamblingan agawe mare thāni salen manahura ya *parmasan i samgat taji mā ku 3 pami ku 1 ri satarub ta kna pacakṣu mawang pangiwō, tan kna sakweh ing saji saji prakāra, mawang tan kna pabharu, kune yan magawe ring thāni katunggalanan manahura ya parmasan i samgat cakṣu wsi ma 1 ku 1 ring satarub tan panusuna, pacakṣu ku 2 tan kna askwehing saji saji saprakara mawang tan kna pabharu, . . .*" (Callenfels, 1926 : 11). Artinya kurang lebih sebagai berikut : "Demikianlah apabila ada orang-orang tamblingan bekerja di desa lain supaya mereka membayar *parmasan* kepada *samgat taji 1 māśaka 3 kupang*, pajak pembelian *1 kupang* setiap tarub (Mereka) tidak dikenai pajak pengawasan serta pajak pemeliharaan. Tidak dikenai berbagai macam saji-sajian, dan tidak dipunguti iuran sebagai warga baru. Adapun bila mereka bekerja di

dalam wilayah desa agar membayar *parmasan* kepada *samgat cakṣu wsi 1 masaka 1 kupang* setiap tarub tidak akan dilipatgandakan, dan membayar pajak pengawasan *2 kupang*, tidak dikenai berbagai macam sesajen serta tidak dipunguti iuran sebagai warga baru".

Keterangan tentang *parmasan* juga dimuat di dalam prasasti Pura Penataran Pucangan, Kayubihi Bangli yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu pada tahun Saka 999 (1077 Masehi). Pada prasasti ini disebutkan "... , mawang yan hana palarknya ri thāni salen aweha pangrama ku 1 agēnding ngamukul añuling momahi thāninya manngahana *parmasan sapatahilnya ri nayakanya, aginding, ma 1 , ku 1 amukul ku 2 sa 3 knanya patanggar ku 1 anuling ku 1 munggha mare bhatara, . . . , mangkana yan hana sulpika mas sulpika tambra, sulpika wsi, manngahana parmasan, mula ma 2 ku 2 manahura mā 1 munggha mare bhatāra, . . .*" (Ekawana dan Jaya, 1987 : 13). Artinya : Apabila ada pendatang dari desa lain supaya membayar *pangrama 1 kupang*, penyanyi, penabuh gambelan, peniup seruling yang bertempat tinggal di wilayah desanya supaya membayar *parmasan* dibayarkan kepada pemimpinnya atau pejabat. Penyanyi membayar *1 masaka 1 kupang*, penabuh gambelan *2 kupang 3 saga*, juga dikenai *patanggar 1 kupang*, peniup seruling membayar *1 kupang* supaya dihaturkan kepada *Bhatāra. . . .* Demikianlah bila ada tukang tatah mas, tukang tatah tembaga, tukang tatah besi, supaya mengentengahkan atau membayar *parmasan* berlaku sejak dulu *2 māśaka 2 kupang*,

supaya membayar *1 māśaka 1 kupang* dipersembahkan kepada *Bhatara*.

Dilihat dari konteks kalimat prasasti Gobleg, Pura Batur B. dan dibandingkan dengan prasasti Pura Penataran Pucangan, menunjukkan bahwa *parmasan* adalah merupakan pajak, iuran, pungutan atau yang sejenis itu yang dikenakan kepada penduduk yang menekuni pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pajak ini tidak khusus ditujukan kepada perajin mas. Atau dengan kata lain *parmasan* merupakan pajak dalam bentuk mas atau uang mas. Mengingat hal ini kiranya perlu dicermati pajak-pajak lainnya seperti *pabhumī, pawija, babusung, pawsi*, dan yang semacam itu.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Tamblingan berusaha mengembangkan dan menekuni berbagai macam profesi sesuai dengan potensi sumber daya alam, bakat, kesempatan, dan berbagai kemungkinan yang tersedia. Salah satu di antaranya adalah sebagai perajin besi atau pande besi. Dalam kehidupan masyarakat Tamblingan tampaknya para pande besi cukup berperan. Keterangan prasasti Bulian B. menunjukkan bahwa pande besi tamblingan mempunyai nilai lebih daripada pande besi yang ada di Desa Banyuwah. Keberadaannya semakin tampak jelas terbukti dengan terbitnya prasasti Tamblingan dan prasasti Gobleg, Pura Batur C. yang khusus ditujukan kepada mereka agar kembali ke desa bekerja seperti semula. Melihat isi prasasti ini menunjukkan bahwa para pande besi

telah pergi meninggalkan Tamblingan menuju suatu tempat, tetapi sayang tempat mana yang mereka tuju tidak diketahui dengan jelas.

Erat kaitannya dengan kepergian para pande besi dari Tamblingan dan terbitnya prasasti Tamblingan pada tahun 1306 Saka dan prasasti Gobleg, Pura Batur C. pada tahun 1320 Saka beberapa persoalan perlu mendapat perhatian. Kepergian para pande besi dari Tamblingan dapat dihubungkan dengan peristiwa penaklukan Bali oleh bala tentara Majapahit. Dalam *Negarakretagama* disebutkan Bali ditaklukan oleh bala tentara Majapahit pada tahun 1256 Saka atau 1343 Masehi (Slametmulyana, 1979 : 145). Sumber-sumber historiografi tradisional berupa babad misalnya babad *Usana Jawa* menyebutkan bala tentara Majapahit dipimpin oleh para arya yaitu Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belog, Arya Kepakisan, Arya Binculuk, Arya Beleteng, Arya Kutawaringin, Arya Kanuruhan, dan beberapa arya lain (Warna dan Murdha, 1986 : 39). Tidak diketahui dengan pasti apakah Arya Kenceng yang disebut dalam *Usana Jawa* dan beberapa babad identik dengan Arya Cengceng yang disebut dalam prasasti Tamblingan dan prasasti Gobleg, Pura Batur C. yang mengganggu para pande besi di Tamblingan.

Pernyataan dalam prasasti Tamblingan dan prasasti Gobleg, Pura Batur C. yang menyebut Arya Cengceng mengganggu pande besi di Tamblingan mungkin merupakan bahasa politik untuk sekedar menghaluskan arti dari tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh Arya Cengceng dengan memanfaatkan stabilitas kerajaan yang belum mantap pada masa transisi pemerintahan dari raja-raja Bali Kuna akhir kepada penguasa baru dari Majapahit. Mendapat perlakuan yang demikian sangat logis para pande besi Tamblingan pergi meninggalkan desanya. Kepergian mereka bisa jadi merupakan suatu sikap pernyataan tidak puas atau tindakan protes terhadap kebijakan pemerintah baru yang berasal dari Majapahit.

Kepergian para pande besi dari Tamblingan mungkin oleh penguasa baru dari Majapahit dipandang sebagai suatu gejolak sosial yang juga dapat berpengaruh terhadap stabilitas kerajaan secara keseluruhan. Oleh karena demikian maka dipandang perlu untuk mengantisipasi hal itu. Salah satu alternatif yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan prasasti Tamblingan yang berangka tahun 1306 Saka. Tampaknya perintah ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan sehingga turun perintah yang sama pada tahun 1320 Saka yaitu prasasti Gobleg, Pura Batur C. Sama halnya dengan perintah yang pertama ternyata untuk yang kedua kalinya tidak ditanggapi secara positif oleh pande besi Tamblingan. Sebagai indikasi dari kegagalan ini, sampai saat ini di daerah Tamblingan dan sekitarnya tidak ada penduduk yang berprofesi sebagai *pande besi* dan yang menyatakan diri sebagai keturunan *pande Tamblingan*.

Adanya pengulangan perintah yang sama kepada *pande besi* Tambling-

an memang menunjukkan kelompok tersebut cukup berperan terutama sebagai produsen barang-barang yang dibuat dari besi. Akan tetapi belum diketahui dengan jelas apakah pande besi di Tamblingan sebagai sentra industri besi ataukah sebagai produsen barang-barang industri strategis bagi kerajaan. Kiranya hal ini perlu dicermati, mengingat pada masa beberapa kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Banten, Mataram, Surakarta, Yogyakarta pusat-pusat industri atau kerajinan semacam itu berada tidak jauh dari lingkungan keraton. Misalnya Kota Gede sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam dikelilingi oleh perkampungan penduduk seperti Pandeyan, Samakan, Jagalan, Sayangan, Kauman, Pondongan dan Mranggen (Abbas dan Bugie Kusumohartono, 1994 : 222-234).

Masih merupakan persoalan yang gelap siapakah tokoh yang tidak menyebut jati dirinya yang mengeluarkan perintah dalam prasasti Tamblingan dan prasasti Gobleg, Pura Batur C. Setahun lebih awal dari prasasti Tamblingan yakni pada tahun 1305 Saka terbit prasasti Abang, Pura Batur C. atau prasasti Tulukhyu C. atas nama Paduka Parameswara Sri Wijayaraja. Dengan jelas beliau disebut sebagai penguasa negara bagian Wengker. Dalam prasasti ini gelar beliau cukup panjang, yaitu *pāduka śrī mahārāja parameswara, śrī sakala prajānandanakarāna, sarāda mala śaśāngka suddhaya gowraja, dharanī dhārana phanīswara nabhibhūta, ucchāwicchinnottarīya gangga ya ratnadi prawandhaneśwara jnanodgara gurūpamāna*

sapatnaniwa hāndha karanikara dhwangsi sahasradyuti, pāduka parameswara śrī wijayarāja nama dewābhiseka, sangapañjiwaning hyun garbhodayanama cañcu kudāmṛta wēngkēr mahāpurādhiṣṭita, inadhisdānasire nagarewēngkēr (Budiastra, 1980 : 15). Pāduka Parameswara Sri Wijayaraja atau Bhre Wengker adalah paman raja Hayam Wuruk yang diketahui amat aktif ikut mengatur pemerintahan, memiliki kekuasaan besar dan bahkan mengeluarkan prasasti atas namanya sendiri pada waktu Hayam Wuruk masih hidup (Wibowo, 1987 : 27).

Berdasarkan atas keterangan prasasti Abang, Pura Batur C. diduga yang mengeluarkan perintah dalam prasasti Tamblingan adalah Paduka Parameswara Sri Wijayaraja. Kemudian dalam prasasti Gobleg, Pura Batur C. disebut dengan *Pāduka Bhattara Sri Parameswara* yang dicandikan di Wisnubhawana, karena pada waktu penerbitan prasasti ini beliau sudah wafat. Di dalam Pararaton disebutkan Bhre Wengker wafat pada tahun 1310 Saka (*saka gagana rupa anahut wulan*) dicandikan di Manyar dengan nama candi Wisnubhawana (Slametmulyana, 1983 : 221). Tokoh yang mengeluarkan perintah prasasti Gobleg, Pura Batur C. belum diketahui jati dirinya apakah salah seorang penguasa negara-negara bagian Majapahit di daerah Jawa ataukah raja-raja Bali keturunan dinasti Kresna Kepakisan yang juga berasal dari pulau Jawa.

IV

Kiranya dapat disampaikan bahwa daerah Tamblingan dan sekitarnya sudah

cukup lama menjadi pemukiman, setidaknya sejak tahun 915 Masehi, bahkan mungkin jauh sebelum itu. Dihitung dari terbitnya prasasti tertua yang menyebut Tamblingan yaitu prasasti Gobleg, Pura Batur A. tahun 915 Masehi sampai dengan prasasti termuda yaitu prasasti Gobleg, Pura Batur C. tahun 1384 Masehi, berarti Tamblingan dimukimi selama 469 tahun. Dalam rentang waktu yang relatif lama Tamblingan sebagai pemukiman mengalami pasang surut, yang tidak terlepas sama sekali dari potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di daerah itu. Demikian pula pengaruh politik pemerintah atau kerajaan dari waktu ke waktu adalah faktor penentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Novida dan Bugie Kusumohartono, 1994. "Rekonstruksi Keraton Kota Gede dan Permasalahannya", *Jejak-jejak Budaya*, Sumijati Atmokusudiro, Anggraeni, Tular Sudarmadi (Eds), Asosiasi Prehistori Indonesia Rayon II, Yogyakarta : 219 - 225.
- Atmodjo, M.M. Sukarto K., 1970. "Prasasti Bujan-Sanding Tamblingan dari Djaman Radja Jayapangus", *Seminar Sedjarah Nasional II*, Yogyakarta (in press).
- , 1985. "Data Perundagian di dalam Prasasti Kuno", *Diskusi Ilmiah Arkeologi*, I, IAAI Komisariat Yogyakarta-Jawa Tengah (in press).

- Boechari, 1977. "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", *Majalah Arkeologi*, Th. I, No. 2, Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta : 1 - 40.
- Budiastra, Putu, 1980. *Prasasti Pura Tulukbyu Batur Kintamani*, Museum Bali, Denpasar.
- Callenfels, P.V. van Stein, 1926. "Epigraphia Balica", *Verhandelingen van het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, LXVI, Kolff & Co, Batavia.
- Ekawana, I Gusti Putu dan I Made Jaya, 1987. "Prasasti Pura Penataran Pucangan Desa Kayubihi Kecamatan Kintamani", *Laporan Penelitian Arkeologi*, Balai Arkeologi Denpasar.
- Goris, R, 1954. *Prasasti Bali*, I, Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia, NV. Masa Baru, Bandung.
- Hardjowardojo, R. Pitono, 1965. *Pararaton*, Bhratara, Jakarta.
- Slametmulyana, 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- , 1983. *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Warna, I Wayan dan Ida Bagus Gde Murdha (eds), 1986. *Usana Bali Usana Jawa*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Bali, Denpasar.
- Wibowo, A.S., 1978. "Bhre Wirabhumi dan Sebab Terjadinya Paregreg", *Majalah Arkeologi*, Th. I, No. 4, Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta : 23 - 37.
-